

**REKONSTRUKSI PENGATURAN DAN PELAKSANAAN
PUTUSAN PERLINDUNGAN BAGI MANTAN ISTRI UNTUK
MENDAPATKAN HAK MUT'AH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA PATI)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Magister
Program Studi Magister Ilmu Hukum



Diajukan oleh :

TRIAMONO PAMBUDI WIDODO

2018-02-036

**kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2020**

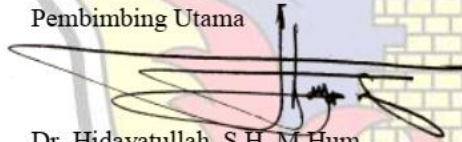
**REKONSTRUKSI PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN
PERLINDUNGAN BAGI MANTAN ISTRI UNTUK MENDAPATKAN
HAK MUT'AH
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA PATI)**

Disusun oleh :
TRIATMONO PAMBUDI WIDODO
NIM: 2018-02-036

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 02 Maret 2020

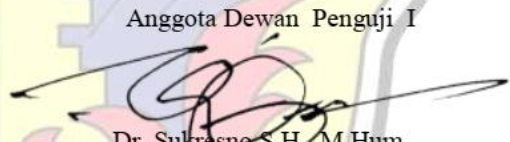
(Susunan Dewan Penguji)

Pembimbing Utama



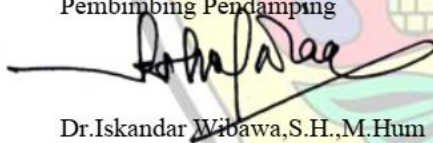
Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum
NIP : 0610701000001007

Anggota Dewan Penguji I



Dr. Sukresno, S.H., M.Hum
NIP : 195506011983031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Iskandar Wibawa, S.H., M.Hum
NIP: 0610701000001013

Anggota Dewan Penguji II



Dr. Subarkah, S.H., M.Hum
NIP: 0610701000001017

Tesis ini telah diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh gelar Magister
Tanggal 02 Maret 2020



(Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum)

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Motto dan Persembahan

Motto :

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada kemudahan Karena itu bila kau telah selesai (mengerjakan yang lain) dan kepada Tuhan,berharaplah.
(Al Quran Surat Al Insyirah : 6-8)

Kesulitan tunduk pada orang yang berjuang, Kesukaran takluk pada orang yang sabar, Kekuatan mengiringi orang yang ikhlas.
-Jusuf Kalla-

Narimo Ing Pandum, Makaryo Ing Nyoto.
(Berusaha sekuat tenaga, menerima pada ketentuan sang pencipta dengan hati yang ikhlas).



Persembahan :

Tesis ini kupersembahkan kepada :

1. Keluargaku tercinta
2. Rekan-rekan Advokat
3. Almamaterku

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : TRIATMONO PAMBUDI WIDODO

NIM : 2018-02-036

Dengan ini menyatakan :

1. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam Tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupapencabutan gelar yang telah diperoleh karena tesis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.



Pati, 02 Maret 2020
Yang Membuat Pernyataan

TRIAMONO PAMBUDI WIDODO

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

Segala puji dan syukur senantiasa saya haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, sehingga saya dapat menyelesaikan dan menyusun penulisan tesis dengan judul “REKONSTRUKSI PENGATURAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PERLINDUNGAN BAGI MANTAN ISTRI UNTUK MENDAPATKAN HAK MUT’AH (STUDI DIPENGADILAN AGAMA PATI)” sebagai persyaratan untuk memenuhi derajat Magister Ilmu Hukum di Universitas Muria Kudus.

Teriring rasa dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan bantuan, dan dalam hal ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr.Suparno, S.H.,M.S selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr.Hidayatullah,S.H.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muria Kudus, sekaligus sebagai pembimbing utama saya.
3. Bapak Dr.Iskandar Wibawa, S.H.,M.Hum sebagai pembimbing pendamping.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
5. Bapak Drs. H Marwan, M.H Ketua Pengadilan Agama Pati, beserta seluruh hakim diPengadilan agama Pati.
6. Bapak Dr.Drs.Sutiyo.,M.H Hakim Pengadilan Agama Pati yang telah membimbing saya.
7. Bapak Tontowi, S.H Panitera Pengadilan Agama Pati, beserta semua Panitera Pengganti, staf dan karyawan Pengadilan Agama Pati.
8. Bapak H Sayoga Darnawi BA tokoh agama dikabupaten Pati.
9. Rekan-rekan Advokat anggota Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang berada diseluruh Indonesia.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Dalam penulisan tesis ini, saya telah berusaha dengan segenap kemampuan namun oleh karena keterbatasan dan pengetahuan sehingga masih banyak kekurangan maupun kesalahan, sehingga dengan kerendahan hati penulismohon maaf , dan demi sempurnanya tesis ini, kami mengharapkan kritik serta saran agar tesis ini menjadi lebih baik, penulis sangat berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan memberikan sumbang sih dalam penyusunan peraturan perundang-undangan dilingkup Peradilan Agama.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pati, 02 Maret 2020

Penulis

TRIAMONO PAMBUDI WIDODO

DAFTAR ISI

Bab I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Keaslian Penelitian.....	13
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	21
Bab. II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	28
B. Tinjauan Tentang Perceraian.....	30
C. Tinjauan Umum tentang Hak Mut'ah	39
D. Kerangka Pemikiran.....	41
Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
Bab V PENUTUP	162
A. Kesimpulan	162
B. Saran.....	167
DAFTAR PUSTAKA	172
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	177

TABEL

1. Tabel Jumlah Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2018	8
2. Tabel Keaslian Penelitian	14
3. Tabel Jumlah Cerai Talak Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2018	81



ABSTRAK

Permohonan Cerai Talak merupakan bentuk pengajuan gugatan cerai yang dimohonkan seorang laki-laki/suami beragama Islam sebagai Pemohon dengan maksud akan menceraikan istrinya di Pengadilan Agama, Sedangkan mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang atau lainnya

Dengan mendasari pada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah (2) ayat 241, dan pada ketentuan Pasal 149 huruf a, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, mut'ah merupakan kewajiban yang diberikan suami sebagai akibat cerai talak, dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang mengatur tentang kapan dan bagaimana mekanisme /tata cara pelaksanaan putusan pemberian mut'ah kepada istri, setelah adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum, dalam praktek hakim dalam putusannya mengukuhkan kepada suami untuk memberikan mut'ah maka penyerahannya dilaksanakan pada saat sidang penyaksian ikrar talak.

Apabila saat sidang penyaksian ikrar talak suami belum mampu memberikan mut'ah sesuai ketentuan pasal 70 ayat 6 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sidang ditunda hingga tenggang waktu enam bulan, akan tetapi jika sampai enam bulan suami tidak mengucapkan ikrar talak makagugurlah penetapan tersebut, sehingga tidak tercapai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dengan demikian pasal tersebut dapat dipergunakan suami dengan berbagai alasannya untuk menghindari pembayaran mut'ah, sehingga tidak ada perlindungan bagi istri untuk mendapatkan hak mut'ah, untuk itu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum terhadap istri untuk mendapat hak mut'ah, dan faktor-faktor yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya putusan tentang pemberian mut'ah.

Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Empiris kemudian pengambilan datanya dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner kepada pihak pemohon/suami maupun termohon/istri yang berperkara di Pengadilan Agama Pati sedangkan pengolahan datanya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk melindungi hak-hak istri khususnya untuk mendapatkan hak mut'ah dalam perkara permohonan cerai talak maka perlu dilakukan rekonstruksi terhadap ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Kata Kunci : Cerai Talak, Rekonstruksi Mut'ah

ABSTRACT

Application for Divorce is a form of filing a divorce suit filed by an Islamic husband / husband as the Applicant with the intention of divorcing his wife in the Religious Court, while mut'ah is the exemption of ex-husband to his wife, who is being fined in the form of something or money or other

Based on the word of Allah Almighty in the letter of Al Baqarah (2) verse 241, and in the provisions of Article 149 letter a, Article 158 Compilation of Islamic Law, mut'ah is an obligation granted by the husband as a result of divorce, in the absence of legal regulation which regulates when and how the mechanism / procedure for executing a mutually exclusive award to the wife, following the existence of the Supreme Court Rule No. 3 of 2017 on Guidelines for Judging the Matter of Law Offices, in practice the judge in her decision sentenced her husband to give ' ah then the submission was made at the hearing of the solemn declaration.

If at the hearing of the husband's solemn vows he has not been able to make the vows in accordance with Article 70 of Article 6 of the Republic of Indonesia Number 7 of 1989 Regarding Religious Justice, the trial is postponed to a period of six months, but for up to six months the husband has not spoken then the ruling falls apart, so that it does not achieve the principles of simple justice, speed and lightness. Thus the case can be used by the husband for various reasons to avoid the payment of mutagah, so that there is no protection for the wife to obtain mut mutah, so the purpose of this study is to know the extent of the legal protection of the wife to obtain mutah rights , and the factors that led to the inability to make the decision on the granting of mutations.

The approach used was Empirical Jurisprudence and then data extraction was conducted using interview guide and questionnaire to the applicant / husband or the applicant / wife concerned in the Court of Religious Affairs while the data processing was presented in descriptive form of analysis.

The results of this study indicate that in order to protect the rights of the wife in particular to obtain mutually exclusive rights in the matter of divorce application it is necessary to reconstruct the provisions of Article 70 of the Republic of Indonesia No. 7: 1989 of Religious Justice as amended by Republic of Indonesia Number 3 of 2006 on amendments to Law No. 7 of 1989 on Religious Justice and second amendment to Republic of Indonesia Law No. 50 of 2009 on second amendment to Law No. 7 of 1989 on Religious Justice.

Keyword : Divorce, Mut'ah Reconstruction